

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Ketidakseimbangan dalam pembangunan ekonomi suatu daerah biasanya terjadi kalau hanya diserahkan kepada kekuatan-kekuatan mekanisme pasar. Perkembangan ekonomi daerah yang diserahkan pada kekuatan-kekuatan mekanisme pasar cenderung memperbesar ketidakmerataan pembangunan antar wilayah. Sebab dalam kenyataan, kegiatan dan perkembangan ekonomi lebih sering terjadi dan terkonsentrasi pada wilayah-wilayah tertentu saja. Sebaliknya, pada wilayah lain yang nampak terjadi hanyalah semakin ketertinggalan saja (Syafrizal, 2015)

Perjalanan pembangunan ekonomi telah menimbulkan berbagai macam perubahan terutama pada struktur perekonomian. Perubahan struktur ekonomi merupakan salah satu karakteristik yang terjadi dalam pertumbuhan ekonomi pada hampir setiap negara maju. Berdasarkan catatan sejarah tingkat pertumbuhan sektoral ini, termasuk pergeseran secara perlahan dari kegiatan-kegiatan pertanian menuju ke kegiatan non pertanian dan akhir-akhir ini, dari sektor industri ke sektor jasa (Arsyad, 1995).

Pembangunan daerah sebagai integral dari pembangunan nasional merupakan suatu proses perubahan yang terencana dalam upaya mencapai sasaran dan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang didalamnya melibatkan seluruh kegiatan yang ada, melalui dukungan masyarakat di berbagai sektor. Pembangunan daerah harus sesuai dengan kondisi potensi serta aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang.

Apabila pelaksanaan prioritas pembangunan daerah kurang sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah, maka pemanfaatan sumber daya yang ada menjadi kurang optimal. Keadaan tersebut dapat mengakibatkan lambatnya proses pertumbuhan ekonomi daerah yang bersangkutan (Rahma,2008).

Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat diperlukan pertumbuhan ekonomi yang meningkat dan distribusi pendapatan yang merata. Pertumbuhan ekonomi ini diukur dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan laju pertumbuhannya atas dasar harga konstan (Masli,2008). Pertumbuhan ekonomi yang cepat akan menimbulkan ketimpangan distribusi pendapatan, hal ini dikarenakan tidak memperhatikan apakah pertumbuhan tersebut lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk, atau perubahan struktur ekonomi. Proses lajunya pertumbuhan ekonomi suatu daerah ditunjukkan dengan menggunakan tingkat pertambahan PDRB, sehingga tingkat perkembangan PDRB perkapita yang dicapai masyarakat seringkali sebagai ukuran kesuksesan suatu daerah dalam mencapai cita-cita untuk menciptakan pembangunan ekonomi (Sukirno, 1981).

Secara makro pertumbuhan dan peningkatan PDRB dari tahun ke tahun merupakan indikator dari keberhasilan pembangunan daerah yang dapat dikategorikan dalam berbagai sector ekonomi, yaitu pertanian, pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, listrik, gas dan air bersih, bangunan, perdagangan, perhotelan dan restoran, pengangkutan dan komunikasi, keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, Sektor jasa lainnya.

Semakin besar sumbangan yang diberikan oleh masing-masing sektor ekonomi terhadap PDRB suatu daerah, maka akan dapat melaksanakan pertumbuhan ekonomi ke arah yang lebih baik. Pertumbuhan ekonomi di lihat dari PDRB merupakan salah satu indikator untuk melihat keberhasilan pembangunan. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi melalui indikator PDRB yang berarti pula akan meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah, peran pemerintah sangat diperlukan, yaitu dalam pembuatan strategi dan perencanaan pembangunan daerah dengan memperhatikan pergeseran sektor ekonomi dari tahun ke tahun (Fitriyah lailatul,2015).

Pesatnya perkembangan ekonomi suatu wilayah akan kurang menguntungkan untuk wilayah-wilayah lainnya karena terjadi ketertarikan sumberdaya. Realitanya, tenaga kerja, modal, perdagangan akan mengalir pada wilayah-wilayah yang berkembang lebih cepat. Sebagai contoh, tenaga kerja produktif dan profesional akan bermigrasi ke wilayah-wilayah yang kegiatan ekonominya berkembang cepat. Mengalirnya sumberdaya-sumberdaya pada wilayah yang ekonominya berkembang pesat memperlambat berkembangnya wilayah-wilayah lain yang kehilangan sumberdaya seperti tenaga kerja, sumberdaya alam dan modal.

Salah satu provinsi di Indonesia yang tidak terlepas dari masalah ketimpangan pembangunan ini adalah Provinsi Sumatera Barat. Provinsi Sumatera Barat merupakan provinsi yang sedang melakukan pembangunan diberbagai sektor di dalam perekonomiannya saat ini.

Ketimpangan pembangunan di Sumatera Barat dapat dilihat berdasarkan suatu indikator atau suatu indeks ketimpangan pembangunan yang salah satunya adalah Gini Rasio bahwa ketimpangan pembangunan antara Kabupaten/Kota di Sumatera Barat selama periode penelitian dapat dikatakan secara umum mengalami peningkatan.

Ketimpangan pembangunan yang terjadi ini diduga akibat dari lemahnya atau kurang mampunya strategi yang dilakukan selama ini untuk mengatasi ketimpangan tersebut. Untuk itu perlu strategi yang pas dan cocok untuk mengatasi ketimpangan pembangunan sehingga ketimpangan ini benar-benar bisa dikurangi.

Perkembangan Gini Rasio di Sumatera Barat pada dari tahun ke tahun sangat berfluktuasi dari tahun 2011-2017. Pada tahun 2011 gini rasio yaitu 0,33 sedangkan pada tahun 2012 naik menjadi 0,34 persen dan pada tahun 2013 turun kembali menjadi 0,33 persen, pada tahun 2014 turun lagi menjadi 0,31 persen, pada taun 2015 turun mejadi 0.28 pesen, sedangkan tahun 2016 naik menjadi 0.31 persen, sedangkan 2017 tetap menjadi 0.31 persen. Sedangkan ketimpangan pembangunan di kabupaten kota di Sumatera Barat paling tinggi pada tahun 2012 berada di Kota Padang panjang pada tahun 2012 sebesar 0,45 persen dan paling rendah di Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2013 yaitu 0.23 persen (BPS Sumatera Barat, 2017).

Faktor yang mempengaruhi ketimpangan pembagunan adalah pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat dari tahun 2012-2017 menunjukkan penurunan dari tahun ke tahun. Tahun 2012 pertumbuhan ekonomi tertinggi terdapat di Kota Solok yaitu sebesar 6.76 persen sedangkan yang terendah

terdapat di Kepulauan Mentawai sebesar 5.37 persen. Tahun 2013 pertumbuhan ekonomi tertinggi terdapat di Kota Padang sebesar 6.66 persen sedangkan yang terendah terdapat di kabupaten solok sebesar 5.63 persen.

Tahun 2014 pertumbuhan ekonomi tertinggi diperoleh oleh Kota Payakumbuh sebesar 6.47 persen dan terendah diperoleh oleh Kabupaten solok sebesar 5.63 persen. Tahun 2015 pertumbuhan ekonomi tertinggi diperoleh oleh Kota Padang sebesar 6.39 persen dan terendah diperoleh oleh Kepulauan Mentawai sebesar 5.19 persen. Tahun 2016 pertumbuhan ekonomi tertinggi diperoleh oleh Kota Padang sebesar 6.21 persen dan terendah diperoleh oleh Kepulauan Mentawai sebesar 5.01 persen. Tahun 2017 pertumbuhan ekonomi tertinggi diperoleh oleh Kota Payakumbuh sebesar 7.13 persen dan terendah diperoleh oleh Kota solok sebesar 5.31 persen (BPS Provinsi Sumatera Barat, 2017).

Faktor lain yang mempengaruhi ketimpangan pembangunan yaitu indeks pembangunan manusia. Peningkatan pembangunan manusia dapat dicermati dari angka indeks pembangunan manusia (IPM). IPM disusun dari sejumlah komponen dasar kualitas hidup dari data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat dalam kurun waktu 2012 hingga 2017 Indeks.

Pembangunan Manusia Sumatera Barat dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi. Pada tahun 2017 Indeks Pembangunan Manusia Sumatera Barat sebesar 70.86 persen melebihi Indeks Pembangunan Manusia Indonesia atau nasional yaitu sebesar 70.25 persen. Secara nasional, Indeks Pembangunan Sumatera Barat menempati urutan ke 9 (sembilan) dengan status tinggi. Indeks

Pembangunan Manusia Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat dari tahun ke tahun mengalami peningkatan Rata-rata Indeks.

Pembangunan Manusia dari tahun 2012 hingga 2017, IPM tertinggi dicapai oleh Kota Padang sedangkan yang terendah diperoleh oleh Kepulauan Mentawai. Pada tahun 2017 ada beberapa daerah yang berhasil menaikkan status Indeks Pembangunan Manusia yaitu Tanah Datar sebesar 70,92 persen, Agam sebesar 70,36 persen, Dharmasraya sebesar 70,65 persen, Sawahlunto sebesar 70,67 persen, serta Kota Padang dengan status Indeks Pembangunan Manusia yang sangat tinggi yaitu sebesar 81,06 persen (BPS Provinsi Sumatera Barat, 2017).

Relatif tingginya Indeks Pembangunan Manusia di Sumatera Barat dipengaruhi oleh tingkat kemiskinan. Masalah kemiskinan selalu merupakan persoalan yang kompleks yang terkait dengan berbagai dimensi yakni sosial, ekonomi, budaya, politik serta dimensi ruang dan waktu.

Selain itu pengangguran juga berpengaruh terhadap ketimpangan pembangunan. Pengangguran adalah masalah makro ekonomi yang mempengaruhi manusia secara langsung dan merupakan masalah yang paling berat. Kebanyakan orang kehilangan pekerjaan berarti penurunan standar kehidupan dan tekanan psikologis (Mankiw, 2006).

Pengangguran adalah orang yang masuk dalam angkatan kerja (15 sampai 64 tahun) yang sedang mencari pekerjaan dan belum mendapatkannya. Orang yang tidak sedang mencari kerja contohnya seperti ibu rumah tangga, siswa sekolah smp, sma, mahasiswa perguruan tinggi, dan lain sebagainya yang karena sesuatu hal tidak/belum membutuhkan pekerjaan.

Tingkat pertumbuhan angkatan kerja yang cepat dan pertumbuhan lapangan kerja yang relatif lambat menyebabkan masalah pengangguran yang ada di suatu daerah menjadi semakin serius. Besarnya tingkat pengangguran merupakan cerminan kurang berhasilnya pembangunan di suatu negara. Menurut (Sukirno,2003) salah satu unsur yang menentukan kemakmuran suatu masyarakat adalah tingkat pendapatan. Pendapatan masyarakat mencapai maksimum apabila kondisi tingkat penggunaan tenaga kerja penuh (*full employment*) dapat terwujud. Pengangguran akan menimbulkan efek mengurangi pendapatan masyarakat, dan itu akan mengurangi tingkat kemakmuran yang telah tercapai. Semakin turunnya tingkat kemakmuran akan menimbulkan masalah lain yaitu kemiskinan.

Tingkat pengangguran terbuka di Sumatera Barat pada tahun 2011 hingga 2017 cenderung tidak stabil, pada tahun 2011 tingkat pengangguran terbuka sebesar 7,52 persen, kemudian turun menjadi 6,21 persen di tahun 2012. Selanjutnya mengalami kenaikan di tahun 2013 sebesar 6,97 persen, dan mengalami penurunan kembali sebesar 6,18 di tahun 2014. Selanjutnya mengalami kenaikan di tahun 2015 sebesar 6,89 persen dan mengalami penurunan kembali di tahun 2016 sebesar 5,09 persen. Sedangkan pada tahun 2017 pengangguran terbuka mencapai 4.85 persen. Akan tetapi dari tahun 2011 hingga 2017 cenderung menurun, hal ini menunjukkan bahwa adanya peningkatan angkatan kerja baru dan masih mampu diserap oleh lapangan kerja sehingga tingkat pengangguran berhasil ditekan, namun tingkat pengangguran Sumatera Barat lebih tinggi dari rata-rata nasional (BPS Provinsi Sumatera Barat, 2017).

Faktor lain yang mempengaruhi ketimpangan pembangunan di Sumatera Barat adalah pengeluaran pemerintah. Berdasarkan data BPS pengeluaran pemerintah pada tahun 2013 pengeluaran pemerintah tertinggi terdapat di Padang sebesar 11.94 persen dan yang terendah terdapat di Pariaman sebesar 2.94 persen.

Pada tahun 2014 pengeluaran pemerintah tertinggi terdapat di Padang sebesar 11.78 persen dan yang terendah terdapat di Padang Panjang sebesar 2.67 persen. Tahun 2015 pengeluaran pemerintah tertinggi terdapat di Padang sebesar 11.34 persen dan terendah terdapat di Kota Solok sebesar 2.82 persen. Tahun 2016 pengeluaran pemerintah tertinggi terdapat di Padang sebesar 11.22 persen dan terendah terdapat di Kota Solok sebesar 2.83 persen. Sedangkan pada tahun 2017 pengeluaran pemerintah tertinggi di Kota Padang sebesar 10.80 persen dan terendah terdapat di Kota Solok sebesar 2.85 persen. Dapat di lihat bahwa dari tahun 2013 sampai 2017 pengeluaran pemerintah terdapat di Kota Padang (BPS, Provinsi Sumatera Barat, 2017).

Berdasarkan uraian ringkas fenomena penelitian yang menunjukkan semakin tingginya ketimpangan pembangunan di Sumatera Barat pada umumnya dan 19 kabupaten dan kota pada khususnya mendorong peneliti kembali tertarik untuk melakukan penelitian yang akan membahas sejumlah variabel yang diduga mempengaruhi ketimpangan pembangunan pada 19 kabupaten dan kota di Sumatera Barat.

Penelitian ini merupakan modifikasi dari sejumlah penelitian dimasa lalu, dimana terdapat beberapa perbedaan penting antara penelitian ini dengan sejumlah penelitian dimasa lalu. Perbedaan tersebut meliputi waktu dan tempat

penelitian relatif berbeda. Model analisis yang digunakan untuk membuktikan kebenaran hipotesis juga berbeda, disamping peneliti juga menggunakan beberapa variabel yang berbeda sehingga diharapkan melalui perbedaan tersebut akan diperoleh hasil penelitian yang lebih baik. Penelitian ini merupakan penelitian empiris yang berjudul: **Analisis Ketimpangan Pembangunan Antar Kabupaten Dan Kota di Sumatera Barat.**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pembangunan pada 19 Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat ?
2. Bagaimanakah pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap ketimpangan pembangunan pada 19 Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat ?
3. Bagaimanakah pengaruh tingkat pengangguran terhadap ketimpangan pembangunan pada 19 Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat ?
4. Bagaimanakah pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap ketimpangan pembangunan pada 19 Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat ?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan uraian rumusan masalah tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah:

1. Membuktikan dan menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pembangunan pada 19 Kabupaten dan Kota di

Sumatera Barat.

2. Membuktikan dan menganalisis pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap ketimpangan pembangunan pada 19 Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat.
3. Membuktikan dan menganalisis pengaruh tingkat pengangguran terhadap Ketimpangan Pembangunan pada 19 Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat.
4. Membuktikan dan menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap Ketimpangan Pembangunan pada 19 Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Sesuai dengan uraian tujuan penelitian diharapkan hasil yang diperoleh pada penelitian ini dapat memberikan manfaat positif bagi

1. Pengembangan ilmu pengetahuan, yaitu dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan dan wahana latihan pengembangan kemampuan dalam bidang penelitian dan menerapkan ilmu yang didapat selama perkuliahan.
2. Bagi instansi yang terkait, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan atau pertimbangan dalam mengambil keputusan tentang permasalahan kemiskinan di masa yang akan datang.